KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan III 2020

Penyusun :
Penanggung Jawab : **Midden Sihombing** | Ketua Tim : **Rohaniah** |
Editor : **Irfan B Purnomo** | Anggota : **Suhartadi** | **Muh Sholeh** | **Ulfa Aprilia** |
Apriliansyah Noor | **Amrizal**

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama mari kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan izin-Nya maka Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III tahun 2020 ini bisa diselesaikan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa data, informasi maupun masukan yang sangat membantu penyelesaian kajian ini.

Kajian Fiskal Regional ini disusun sebagai salah satu bentuk peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi fiskal regional, yang terdiri dari indikator ekonomi, indikator kesejahteraan, kinerja pelaksanaan APBN dan APBD.

Dengan kajian ini, diharapkan kebijakan fiskal, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dirumuskan, direncanakan dan diimplementasikan lebih baik. Upaya ini diyakini akan menjadi stimulus sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi regional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.

Kami menyadari bahwa kajian ini tentunya masih banyak kekurangan, karena keterbatasan data ataupun kekhilafan tim penyusun. Masukan, saran atau bahkan kritik tentunya sangat kami harapkan untuk perbaikan kajian ini dimasa mendatang.

Terima kasih, Wassalamu'alaikum wr.wb.

Midden Sihombing
Kakanwil DJPb Prov. Kaltim

DAFTAR ISI

I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL	1
	A. Produk Domestik Regional Bruto	1
	B. Inflasi	3
	C. Indikator Kesejahteraan	4
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	6
	A. Pendapatan Negara	6
	B. Belanja Negara	8
	C. Prognosis Realisasi APBN	10
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	11
	A. Pendapatan Daerah	12
	B. Belanja Daerah	15
	C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun	16
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	17
	A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	17
	B. Pendapatan Konsolidasian	17
	C. Belanja Konsolidasian	19
	D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20
V.	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	21
	A. Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi	21
	B. Penyaluran Pembiyaan Ultra Mikro (UMi)	23

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pada Triwulan III 2020, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur mulai menggeliat. Setelah pada Triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 6,53 persen *(q-to-q)* dan 5,46 persen *(y-on-y)* akibat pandemi COVID-19, *Pertumbuhan ekonomi positif di Triwulan III 2020 mencapai 2,39 persen (q-to-q), menunjukkan adanya kinerja yang lebih baik. Meskipun, pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2020 dibanding Triwulan III 2019 terkontraksi sebesar 4,61 persen (y-on-y)*. Angka pertumbuhan yang menghasilkan PDRB sebesar Rp144,24 triliun (ADHB) dan Rp116,98 triliun (ADHK) tersebut secara *q-to-q* masih jauh dibawah pertumbuhan Nasional sebesar 5,05 persen dan secara *y-on-y* terkontraksi lebih dalam dibanding kontraksi ekonomi nasional yang mencapai 3,49 persen.

Grafik PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

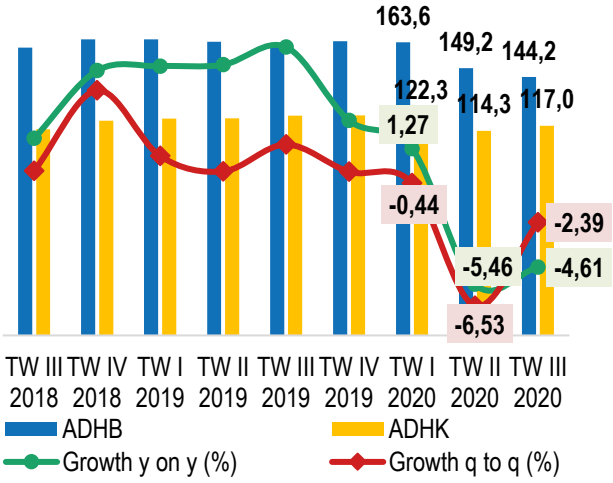

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Kontraksi ekonomi di Kalimantan Timur secara *y-on-y* menjadi yang tertinggi kedua dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Kontraksi terendah secara y-on-y terjadi di Kalimantan Utara dengan kontraksi sebesar 1,46 persen *(y-on-y).* Seluruh provinsi di Pulau Kalimantan Triwulan III secara *q-to-q* tumbuh positif, dengan capaian tertinggi terjadi di Kalimantan Barat sebesar 4,89 persen *(q-to-q).*

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian Triwulan III 2020 di Pulau Kalimantan

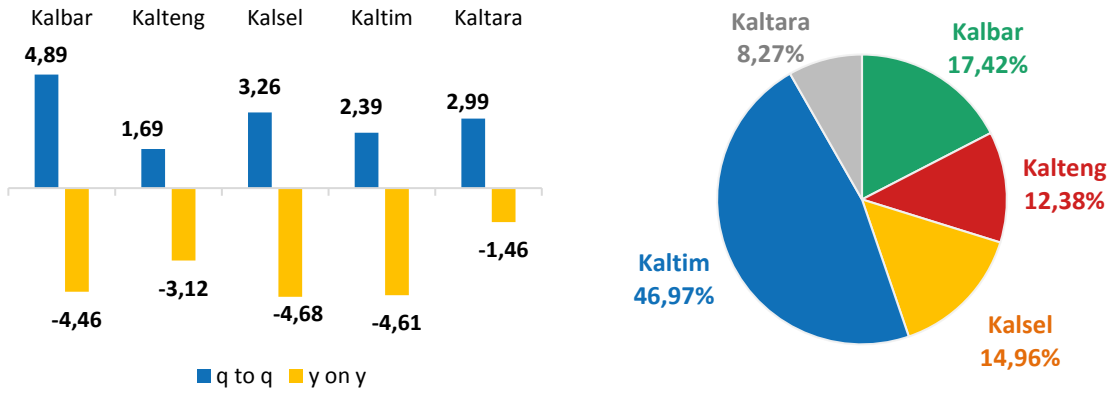

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

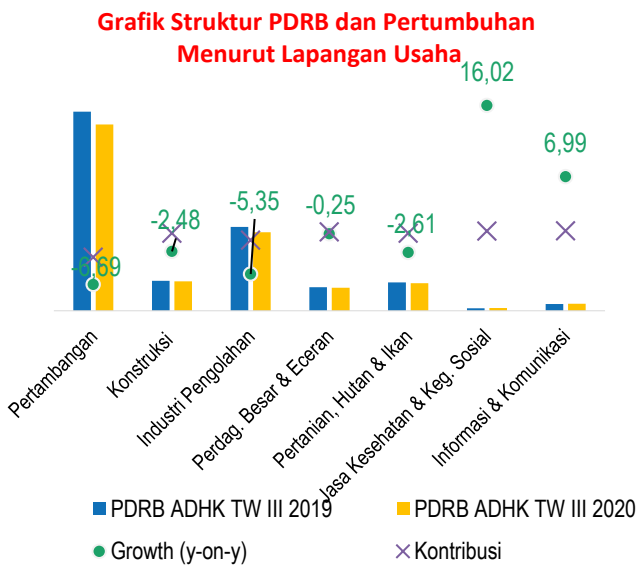

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pandemi global COVID-19 mempengaruhi kinerja pertambangan di Kalimantan Timur. Sektor pertambangan sebagai penyumbang struktur ekonomi terbesar di Kalimantan Timur, sebesar 38,90 persen, pada periode ini kembali mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,69 persen *(y-on-y)* dan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,53 persen *(q-to-q)*. Kontraksi tersebut juga terjadi seiring dengan penurunan harga batubara. Berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA) dari Kementerian ESDM, rata-rata HBA pada Triwulan III 2020 sebesar 50,64 US$ mengalami penurunan sebesar 19,49 US$ dari harga acuan triwulan III 2019 sebesar 70,13 US$. Dan rata-rata HBA pada Triwulan III 2020 ini mencapai titik terendah sepanjang tiga tahun terakhir (September 2017 s.d. September 2020). Sementara disisi yang lain, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 16,02 persen dan 6,99 persen menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 0,10 persen dan 0,11 persen.

Dilihat dari sisi ekspor, hasil tambang non migas juga mengalami penurunan 25,15 persen dari 9,52 miliar US$ menjadi 7,13 miliar US$ di Triwulan III 2020 (Berita Resmi Statistik, Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Kalimantan Timur bulan September 2020).

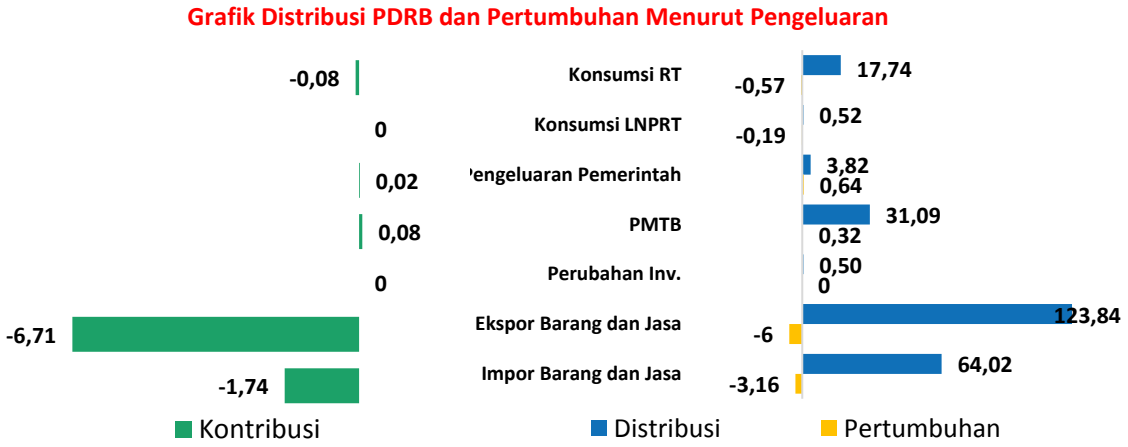

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat menurut pengeluaran, *porsi terbesar pembentuk PDRB Triwulan III 2020 masih berasal dari komponen ekspor LN di mana kegiatan tersebut membentuk 33,89 persen dari total PDRB*. Bahan Bakar Mineral merupakan komoditi utama dalam kegiatan ekspor di Kaltim yang dari Januari - September 2020 mencapai 85,05 persen dari keseluruhan angka ekspor Kaltim (Berita Resmi

Statistik, Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Kalimantan Timur bulan September 2020). Pada periode ini, kontraksi terjadi hampir pada seluruh komponen kecuali komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang sanggup tumbuh sebesar 0,32 persen *(y-on-y)* dan 2,15 persen *(q-to-q)* dan Pengeluaran Pemerintah yang tumbuh sebesar 0,64 persen *(y-on-y)* dan 21,84 persen *(q-to-q)* yang menyumbangkan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,08 persen dan 0,02 persen.

B. Inflasi

Mengawali Triwulan III tahun 2020, tercatat inflasi pada tingkat 0,07 persen, berbanding terbalik dengan tingkat nasional yang terjadi deflasi sebesar 0,10 persen. Berdasarkan kota pembentuknya, inflasi pada Kota Samarinda sebesar 0,36 persen dan deflasi pada Kota Balikpapan sebesar 0,30 persen.

Grafik Kelompok Penyumbang Inflasi Triwulan III Tahun 2020

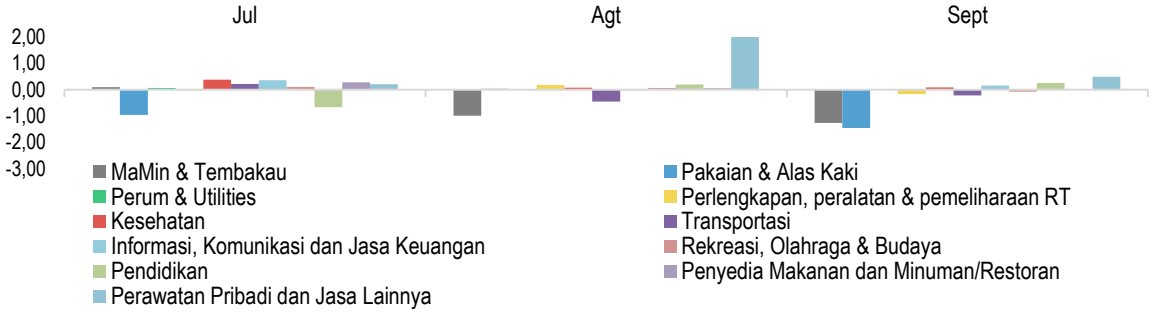

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pada bulan Juli hampir semua kelompok mengalami inflasi kecuali pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki, Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharan Rumah Tangga serta Pendidikan.

Grafik Tingkat Inflasi Kaltim dan Nasional s.d Triwulan III Tahun 2020

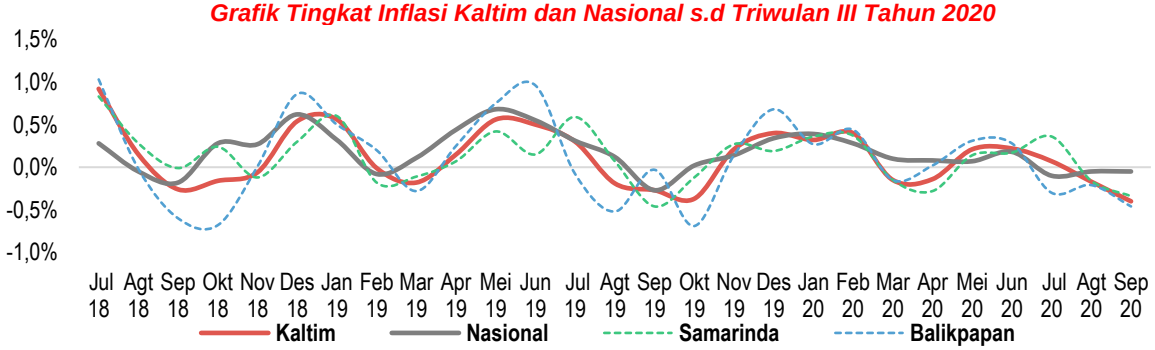

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

Memasuki bulan Agustus, Kaltim mulai mengalami deflasi tercatat sebesar 0,17 persen. Deflasi yang terjadi di kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Transportasi sebesar 0,99 persen dan 0,45 persen berpengaruh besar pada deflasi sebesar 0,28 persen dan 0,05 persen. Penurunan tarif angkutan udara yang disebabkan pengaruh *low season* menjadi faktor utama terjadinya deflasi pada kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Pada bulan September, tingkat deflasi Kaltim semakin meningkat pada tingkat 0,40 persen. Pada periode ini deflasi tertinggi terjadi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,46 persen dan diikuti oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau di angka 1,26 persen dengan andil berturut-turut yaitu 0,35 persen dan 0,068 persen.

C. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kemiskinan pada Maret tahun 2020 berada pada angka 6,10 persen, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 sebesar 6,00 persen. Tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen dibanding periode September 2019, begitupula jumlah penduduk miskin absolut yang bertambah 9,35 ribu orang. Perkembangan tersebut menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin dari semula sebanyak 220,91 ribu jiwa menjadi 230,26 ribu jiwa.

Grafik Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2020

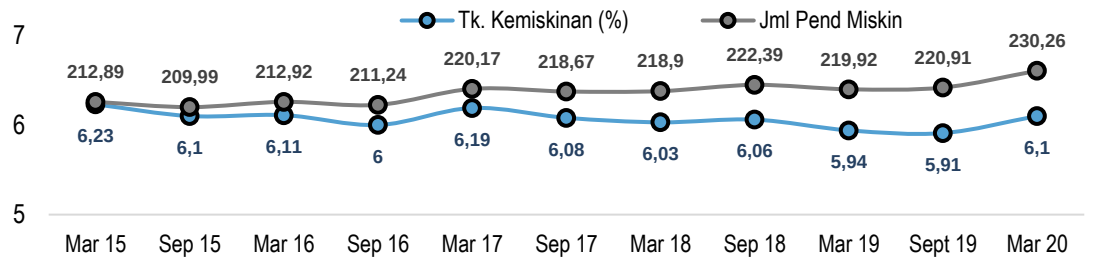

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

Selain persentase dan jumlah penduduk miskin, indikator kesejahteraan juga memperhatikan Indeks Kedalaman Kemiskinan, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan yaitu gambaran mengenai kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Semakin rendah angka

Grafik Indeks Kedalaman & Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2020

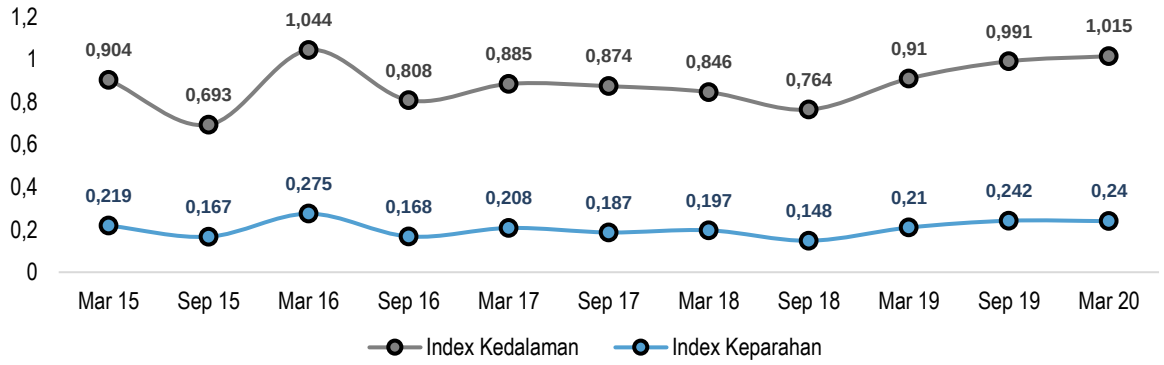

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

indeks, menunjukkan kondisi yang lebih baik. Pada bulan Maret 2020, *Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,024 ke level 1,015*. Kondisi ini menunjukkan kedalaman kemiskinan sedikit bertambah karena rata-rata pengeluaran penduduk miskin

menurun, lebih menjauhi garis kemiskinan, sehingga lebih sulit untuk keluar dari kategori miskin. Sementara itu, *Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami sedikit penurunan dari 0,242 di bulan September menjadi 0,24 pada bulan Maret 2020*. Hal ini mengindikasikan kondisi tingkat keparahan kemiskinan semakin menurun karena ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin menyempit.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka

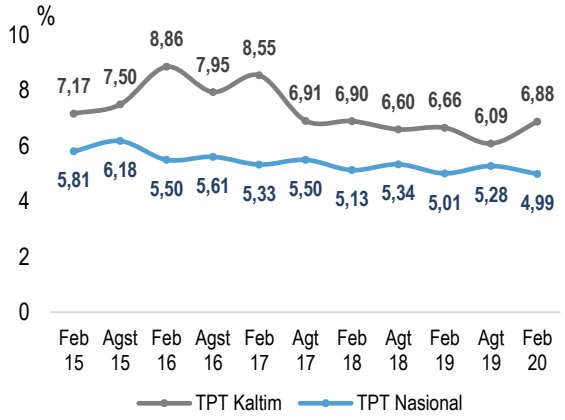

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020 tercatat 6,88 persen atau sekitar 137,19 ribu dari 1,99 juta orang angkatan kerja, naik 0,22 persen dibanding kondisi Februari 2019. TPT pada bulan Februari ini masih jauh di atas tingkat pengangguran nasional sebesar 4,99 persen.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Triwulan III 2018 - 2020

(Miliar Rp)

Uraian	Triwulan III 2018		Triwulan III 2019		Triwulan III 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	**20.271,66**	**13.973,40**	**22.678,98**	**14.888,84**	**17.956,63**	**12.553,24**
1. Penerimaan Pajak	18.870,37	12.747,96	21.609,18	13.728,95	16.795,79	11.366,48
2. PNBP	1.401,29	1.225,44	1.069,81	1.159,89	1.160,85	1.186,76
B. BELANJA NEGARA	**29.390,33**	**19.632,39**	**33.274,51**	**22.820,13**	**28.212,81**	**23.187,70**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**9.661,31**	**5.631,08**	**9.569,27**	**5.528,19**	**8.655,55**	**5.038,94**
1. Belanja Pegawai	2.826,68	2.104,08	2.971,14	2.292,62	3.158,06	2.268,77
2. Belanja Barang	3.924,65	2.192,85	3.442,94	2.125,04	3.161,65	1.687,97
3. Belanja Modal	2.900,32	1.328,30	3.141,43	1.102,95	2.325,93	1.076,12
4. Belanja Bantuan Sosial	9,66	5,86	13,77	7,59	9,90	6,08
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	**19.729,02**	**14.001,31**	**23.705,24**	**17.291,94**	**19.557,27**	**18.148,76**
1. Transfer ke Daerah	18.997,31	13.567,24	22.835,12	16.758,77	18.657,38	17.452,97
a. Dana Perimbangan	18.875,06	13.458,86	22.638,12	16.579,07	18.255,98	17.136,65
1) Dana Alokasi Umum	5.134,62	4.276,43	5.510,71	4.575,10	5.435,58	4.550,16
2) Dana Bagi Hasil	10.838,44	7.233,94	13.973,00	10.359,18	9.881,62	10.048,47
3) Dana Alokasi Khusus	2.902,00	1.948,50	3.154,41	1.644,79	2.938,77	2.538,02
b. Dana Insentif Daerah	122,25	108,38	197,00	179,70	401,40	316,32
2. Dana Desa	731,71	434,07	870,12	533,17	899,89	695,79
C. SURPLUS DEFISIT	**(9.118,67)**	**(5.658,99)**	**(10.595,53)**	**(7.931,29)**	**(10.256,18)**	**(10.634,46)**

Sumber : OmSPAN, Kanwil DJP Kaltim Kaltara, Kanwil DJP Kalbagtim diolah.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan III Tahun 2020

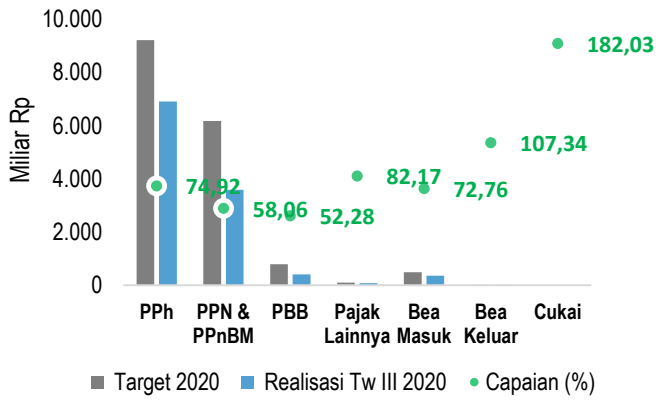

Sumber : Kanwil DJP Kaltim Kaltara & Kanwil DJBC Kalbagtim

Realisasi penerimaan perpajakan tercatat Rp11,36 triliun atau mengalami penurunan sebesar 17,2 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp13,72 triliun. Akan tetapi secara persentase realisasi mengalami kenaikan, pada triwulan III 2019 realisasi hanya mencapai 63,53 persen sedangkan capaian di triwulan III 2020 ini mencapai 67,67 persen, hal ini tak lepas dari perubahan target yang dicanangkan pada APBN-P 2020 yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. PPh dan PPN masih menjadi kontributor utama realisasi penerimaan pajak. Sampai dengan akhir periode laporan, penerimaan PPh mencapai 74,92 persen dari target atau setara Rp6,9 triliun, sedangkan realisasi PPN mencapai 58,06 persen atau sebesar Rp3,58 triliun.

Grafik Perbandingan Realisasi Pajak Triwulan III 2017 s.d. 2020 (Miliar Rp)

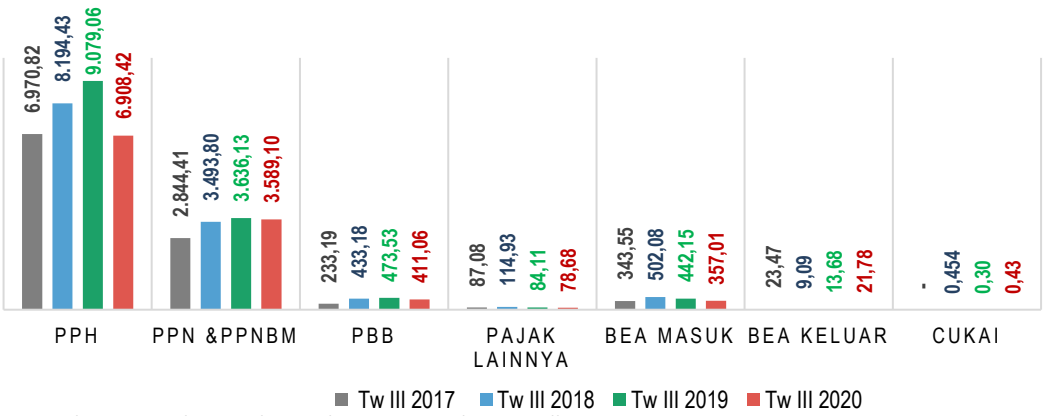

Sumber : Kanwil DJP Kaltim Kaltara & Kanwil DJBC Kalbagtim

Jika dilihat tren realisasi, maka secara umum terjadi penurunan nominal penerimaan, kecuali Bea Keluar dan Cukai.

a) Pajak Penghasilan

Realisasi penerimaan PPh pada Triwulan III tahun 2020 tercatat sebesar Rp6,9 triliun yang mana telah mencapai 74,92 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini sudah sangat baik apabila kita melihat banyaknya relaksasi untuk pajak penghasilan yang dikeluarkan akibat adanya pandemi Covid-19. Kota Balikpapan dan Kota Samarinda masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan PPH ini dengan total Rp3,61 triliun atau 52,32 persen dari total penerimaan.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada Triwulan III tahun 2020 sebesar Rp3,58 triliun, mengalami penurunan sedikit dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 yang mencapai Rp3,63 triliun. Sama dengan PPh, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda masih menjadi penyumbang terbesar dengan 82,62 persen dari total penerimaan PPN dan PPnBM.

Sampai dengan 30 September 2020, terdapat daerah yang membukukan angka pengembalian (restitusi) PPN lebih besar dari realisasi penerimaan sehingga mengakibatkan angka realisasi total minus yaitu Kabupaten Paser sebesar (Rp172,4 miliar) dan Kabupaten Kutai Barat sebesar (Rp38,7 miliar).

c) Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Realisasi penerimaan Bea dan Cukai pada Triwulan III tahun 2020 sebesar Rp379,22 miliar atau 74,18 persen dari target tahun 2020. Penerimaan tersebut terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp357 miliar dan Bea Keluar senilai Rp21,78 miliar. Sementara itu, penerimaan cukai hanya sebesar Rp428,78 juta.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan Triwulan III tahun 2020 sebesar Rp1186,76 miliar mengalami peningkatan sebesar 2,24 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1160,85 miliar.

PNBP yang tercatat di wilayah Kaltim hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu PNBP Lainnya dan PNBP Badan Layanan Umum.

Mayoritas PNBP Lainnya bersumber dari Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika dapat terealisasi senilai Rp519,6 miliar dan mencatatkan kontribusi sebesar 44,76 persen total realisasi PNBP.

Sementara itu, 3 BLU yang ada di Kaltim yaitu Universitas Mulawarman, RS Bhayangkara Balikpapan dan Bandara Kalimarau menyumbangkan pendapatan sebesar Rp250,3 miliar.

Grafik Struktur Penyumbang PNBP Lainnya Triwulan III 2020

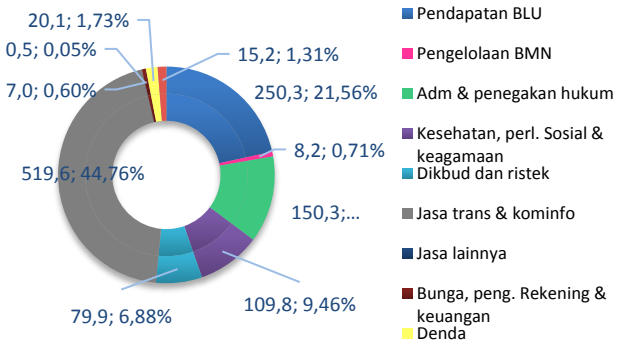

Sumber : LRA LKPK Triwulan III, OMSPAN, diolah.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik Persentase Realisasi Belanja Triwulan III 2020

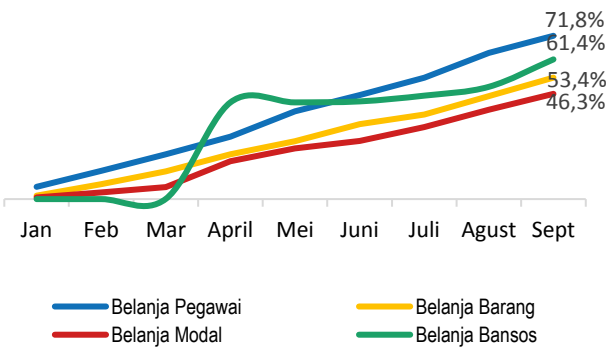

Sumber : LRA LKPK Triwulan III, OMSPAN, diolah.

Realisasi belanja sampai akhir September 2020 secara keseluruhan masih berada pada level 58,2 persen. Dengan alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp8,65 triliun, realisasi tertinggi tercatat pada jenis Belanja Pegawai yang sudah direalisasikan sebesar 71,8 persen dari pagu. Belanja Modal mencatatkan realisasi yang paling rendah pada angka 46,3 persen. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial pada akhir triwulan III ini mencapai 61,4 persen yang digunakan untuk pemberian beasiswa bidik misi and Program Indonesia Pintrar di IAIN Samarinda, program indonesia pintar untuk santri oleh Kementerian Agama, dan pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Bantuan Sosial dialokasikan untuk 2 kementerian yaitu Kementerian Agama sebesar Rp6,57 miliar dan Kementerian Sosial senilai Rp3,33 miliar.

a) Belanja Barang

Grafik Realisasi Belanja Barang Triwulan III 2020 per Klasifikasi Belanja

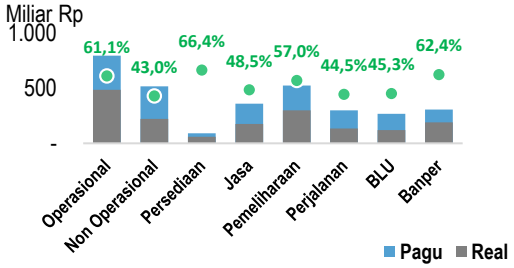

Sumber : LRA LKPK Triwulan III, OMSPAN, diolah.

Pagu terbesar belanja barang diperuntukkan untuk belanja operasional yang mencapai Rp794,7 miliar, dengan angka realisasi sebesar Rp485,6 miliar atau 61,1 persen dari pagu. Pagu Belanja perjalanan dinas tercatat sebesar 9,4 persen dari pagu belanja barang atau Rp300,3 miliar dan sudah dipergunakan 44,53 persen.

b) Belanja Bantuan Pemerintah

Realisasi belanja bantuan pemerintah baru mencapai 62,41 persen atau Rp190,75 miliar sampai dengan triwulan III ini. Alokasi terbesar berada pada Kementerian Kementerian PUPR sebesar Rp124,29 miliar dan Pertanian sebesar Rp43,39 miliar. Dana ini dipergunakan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya, penyediaan rumah susun, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, rehabilitasi sarpras pendidikan dasar dan menengah, penyediaan benih dan bibit, pembangunan irigasi pertanian serta pengadaan peralatan pertanian.

c) Belanja Modal

Belanja modal terbesar dialokasikan kepada satker Kementerian PUPR yang mencapai Rp1,57 triliun atau 72,77 persen dari total belanja modal. Sampai dengan akhir periode laporan, realisasi belanja baru mencapai Rp731,13 miliar atau 46,37 persen.

Grafik Realisasi Belanja Modal Terbesar s.d Triwulan III 2020

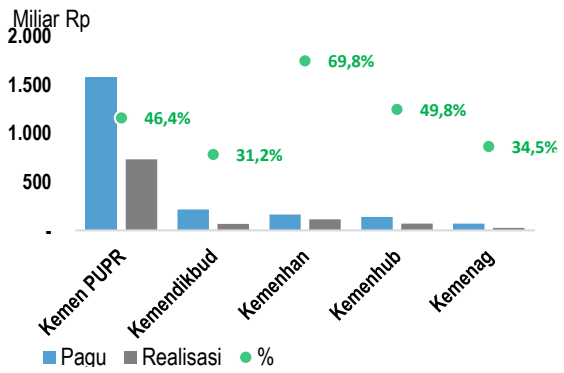

Sumber : LRA LKPK Triwulan III, OMSPAN, diolah.

Alokasi dana yang sangat besar tersebut disediakan untuk beberapa proyek pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan Pulau Balang, preservasi – rekonstruksi - pemeliharaan dan peningkatan jalan nasional, peningkatan SPAL dan SPAM serta pengendalian banjir.

Alokasi belanja modal terbesar kedua pada satker Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencapai Rp215,77 miliar, untuk pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi di Kalimantan Timur, antara lain Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Kalimantan, Politeknik Negeri Samarinda dan Politeknik Negeri Balikpapan, pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala.

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

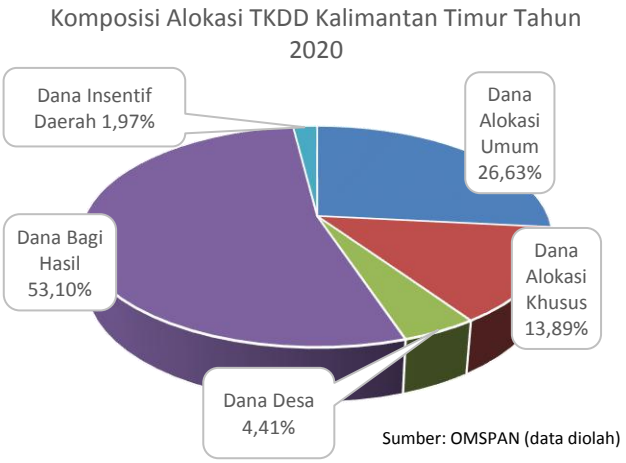

Alokasi TKDD di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp19,55 triliun yang terbagi menjadi lima yaitu Dana Alokasi Umum (26,63%), Dana Alokasi Khusus (13,89%), Dana Bagi Hasil (53,1%), Dana Insentif Daerah (1,97%), dan Dana Desa (4,41%). Dari alokasi tersebut sampai dengan triwulan III 2020 ini telah terealisasi sebesar Rp18,1 triliun atau sebesar 92,8 persen. Tingginya angka realisasi ini adalah imbas dari adanya perubahan peraturan dari Pemerintah yang mempermudah syarat-syarat penyaluran dikarenakan untuk percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19.

3. Manajemen Investasi Pusat

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur per Sektor s.d Triwulan III 2020

Sektor	Debitur	Penyaluran (Rp)	Outstanding (Rp)
Industri Pengolahan	2.274	89.524.367.792	73.638.982.080
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	5.814	216.956.003.592	175.818.760.925
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	244	9.387.906.100	7.435.513.373
Konstruksi	94	4.089.000.000	2.993.803.131
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.488	136.222.870.228	116.285.753.266
Perdagangan Besar dan Eceran	27.070	975.414.919.780	771.425.914.147
Perikanan	1.804	62.230.333.400	54.524.670.452
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	8.741	327.041.950.000	267.628.488.844
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	463	26.716.000.000	22.688.603.858
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	570	27.811.638.330	23.177.780.425
Jasa Pendidikan	22	963.000.000	715.732.241
Jumlah	**49.584**	**1.876.357.989.222**	**1.516.334.002.742**

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program – SIKP (data diolah)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan triwulan III 2020 ini sebesar Rp1,87 triliun yang disalurkan kepada 49.584 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi yang terbesar dalam penyaluran KUR ini dengan debitur mencapai 27.070, yang berarti lebih dari 50% debitur KUR di Kalimantan Tmur.

C. Prognosis Realisasi APBN

Untuk memperoleh prognosis yang relatif mendekati kenyataan, maka beberapa hal telah dipertimbangkan dan diperhitungkan, antara lain:

1) Data historis capaian realisasi pendapatan sejak tahun 2013 sampai 2019 berturut-turut tercatat 93,6% - 83,7% - 72,7% - 68,7% - 87,88% - 97,85% dan 92,88%.
2) Penurunaan target penerimaan negara di APBN karena adanya dampak COVID19 sebesar 21,1%.
3) Data historis capaian realisasi belanja yang tercatat relative stabil sejak tahun 2013 sampai 2019 berturut-turut 84,6% - 85,8% - 85,2% - 85,8% - 94,07% - 92,88% dan 107,64%.
4) Perkiraan realisasi belanja yang bersifat kontraktual berdasarkan data ADK kontrak yang telah diterima KPPN.

Tabel Perkiraan Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2020 (miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III		Perkiraan Realisasi s.d.Triwulan IV	
		Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan Negara	17.956,63	12.553,24	69,91	15.327,78	85,36
Belanja Negara	28.212,81	23.187,70	82,18	26.130,54	92,61
Surplus/Defisit	(10.259,05)	(10.634,46)	103,65	(10.802,76)	105,29

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Hingga akhir Triwulan III 2020, *realisasi pendapatan daerah secara agregat mencapai Rp23,69 triliun atau 71,16 persen dari target*. Tingkat realisasi pada periode ini, secara persentase merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 dan 2019 sebesar 70,98 persen dan 67,74 persen, namun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 25,19 triliun.

Pada periode yang sama, *alokasi belanja dan transfer seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur hanya terealisasi sebesar Rp17,29 triliun atau 46,89 persen dari pagu*. Capaian ini meningkat dibandingkan periode tahun 2019 yang terealisasi 46,42, namun capaian ini menurun dibandingkan periode tahun 2018 yang terealisasi 56,43 persen.

Tabel Realisasi APBD Triwulan III 2018-2020 (Miliar Rp)

URAIAN	Triwulan III 2018		Triwulan III 2019		Triwulan III 2020		
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
PENDAPATAN	**26.399,30**	**18.738,97**	**37.126,96**	**25.186,77**	**33.288,85**	**23.687,43**	**71,16**
PAD	**6.736,35**	**4.837,97**	**8.346,91**	**6.161,13**	**6.264,69**	**5.128,81**	**81,87**
Pajak daerah	4.399,69	3.577,52	5.906,72	4.383,81	3.895,80	3.788,89	97,26
Retribusi daerah	227,83	112,26	193,74	118,99	146,78	105,21	71,68
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	340,10	282,31	301,59	335,23	307,69	154,69	50,27
Lain-Lain PAD Yang Sah	1.768,72	865,88	1.944,86	1.323,10	1.914,42	1.080,02	56,41
Pendapatan Transfer	**18.915,49**	**13.718,66**	**27.732,73**	**18.666,01**	**25.459,82**	**18.228,44**	**71,60**
Dana Bagi Hasil	10.221,13	7.195,93	13.723,42	9.875,51	13.958,70	10.817,69	77,50
Dana Alokasi Umum	5.134,62	4.161,13	5.508,57	4.375,90	4.981,88	3.953,98	79,37
Dana Alokasi Khusus	2.983,72	2.013,75	3.202,01	1.586,05	2.901,93	1.515,96	52,24
Dana Insentif Daerah	122,25	83,00	201,81	225,83	765,41	438,39	57,27
Dana Desa	448,83	262,14	625,76	389,91	115,14	0	0
Transfer / Bantuan Keuangan Pemprov	4,94	2,71	4.471,17	2.212,80	2.736,76	1.502,42	54,90
Lain-lain Pendapatan yang sah	**747,47**	**182,31**	**1.047,32**	**359,63**	**1.564,34**	**330,17**	**21,11**
BELANJA	**26.369,16**	**14.636,29**	**37.919,11**	**17.423,33**	**34.424,73**	**15.720,87**	**45,67**
Belanja Pegawai	9.843,11	6.514,65	11.111,09	6.950,73	11.064,93	6.915,55	62,50
Belanja Barang	7.260,91	3.560,65	10.584,43	4.637,11	9.489,29	3.866,60	40,75
Belanja Modal	7.673,29	3.457,55	11.207,19	3.307,78	8.165,62	2.444,23	29,93
Belanja Bunga	-	-	42,58	20,19	10,84	5,50	50,75
Belanja Subsidi	10,71	2,50	11,63	1,80	4,28	0	
Belanja Hibah	1.464,06	1.075,94	1.413,57	795,60	1.730,81	798,97	46,16
Belanja Bantuan sosial	66,71	10,54	102,68	49,41	111,81	27,22	24,34
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	3.368,01	1.655,17	2.256,71	1.196,41	53,02
Belanja Tidak Terduga	50,36	14,45	77,93	5,53	1.590,43	466,38	29,32
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	**1.532,24**	**1.107,50**	**3.969,69**	**2.020,37**	**2.447,86**	**1.567,65**	**64,04**
BELANJA & TRANSFER	**27.901,40**	**15.743,79**	**41.888,80**	**19.443,70**	**36.872,59**	**17.288,51**	**46,89**
SURPLUS/DEFISIT	**(1.502,10)**	**2.995,18**	**(4.761,85)**	**5.743,07**	**(3.583,74)**	**6.398,91**	**(178,55)**
PEMBIAYAAN	**1.891,34**	**744,22**	**4.449,93**	**2.762,92**	**3.284,07**	**4.837,04**	**4.837,04**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.987,83**	**753,47**	**4.820,80**	**2.805,15**	**3.380,49**	**4.886,10**	**4.886,10**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**96,49**	**9,25**	**370,87**	**42,23**	**96,42**	**49,06**	**19,06**
SILPA	**389,24**	**3.739,40**	**(311,91)**	**8.505,99**	**(299,67)**	**11.235,96**	**(3.749,47)**

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Triwulan III 2020, realisasi PAD mencapai Rp5,13 triliun atau 81,87 persen dari target. Nilai ini secara nominal tercatat lebih rendah dibanding dengan capaian periode yang sama tahun lalu sebesar 6,17 triliun, namun secara persentase mengalami peningkatan sebesar 10,05 persen.

Grafik Komposisi Agregat Pendapatan Asli Daerah s.d. Triwulan III 2018-2020

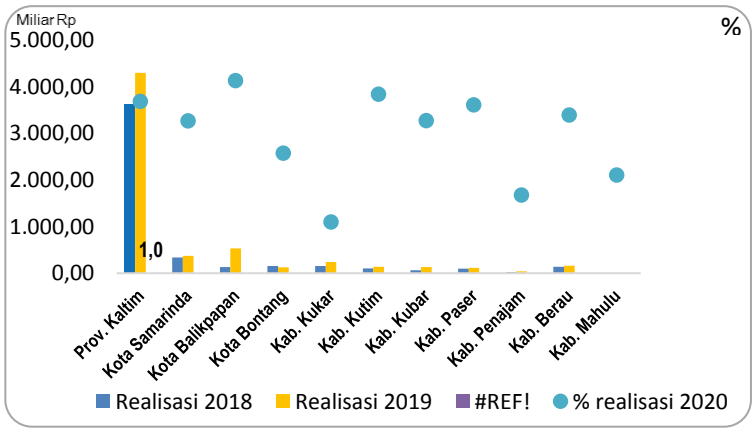

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, Komponen PAD yang mencatatkan realisasi tertinggi secara nominal berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp3,79 triliun, sedangkan retribusi daerah mempunyai nominal realisasi terendah sebesar Rp105,21 miliar. Adapun tingkat persentase realisasi tertinggi dicatatkan komponen Pajak Daerah yaitu sebesar 97,26 persen, sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan persentase 50,27 persen merupakan persentase terendah.

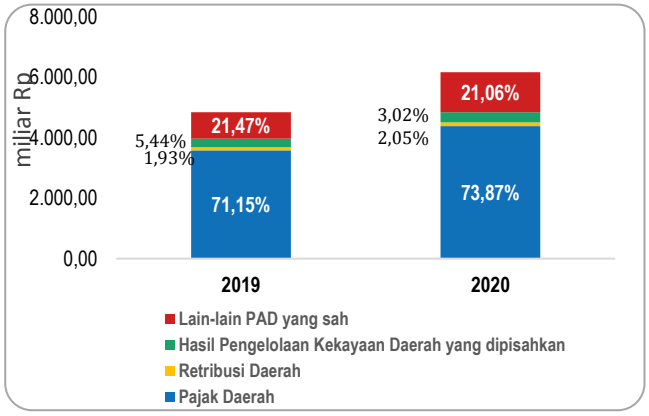

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

Komposisi PAD pada Triwulan III 2020 tidak jauh berbeda dengan komposisi pada periode yang sama di tahun lalu. Komponen Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah mempunyai kontribusi yang sangat besar pada pendapatan daerah masing-masing 71,87 persen dan 21,06 persen.

a) *Penerimaan Pajak Daerah*

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Daerah se Kaltim Triwulan III 2018 - 2020

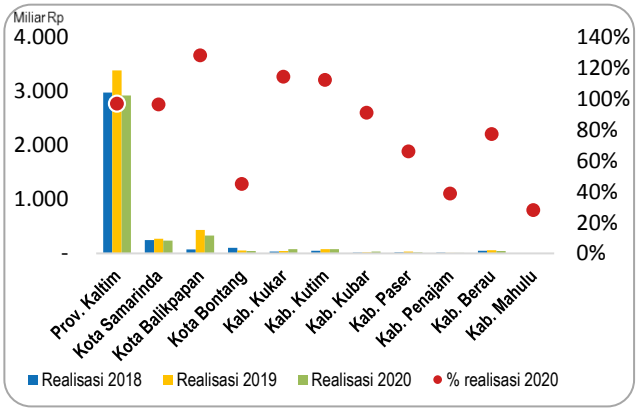

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

Total Pajak Daerah yang terhimpun pada triwulan III tahun 2019 mencapai sebesar Rp3,79 triliun atau 97,26 persen dari target. Sebesar Rp2,92 triliun atau 77,01 persen dari total realisasi pajak daerah bersumber dari Pemprov Kalimantan Timur. Namun secara persentase realisasi terhadap target, capaian tertinggi dicatatkan Kota Balikpapan sebesar 128,30 persen. Jika sumber pajak daerah tidak memperhitungkan penerimaan dari Pemprov Kalimantan Timur, maka daerah dengan penyumbang pajak daerah terbesar berasal dari Kota Balikpapan.

b) *Penerimaan Retribusi Daerah*

Sampai dengan akhir bulan September 2020, realisasi di seluruh Pemerintah Daerah se Kalimantan Timur baru mencapai Rp105,21 miliar atau sebesar 71,68 persen dari target. Realisasi pada periode ini mengalami kenaikan secara persentase sebesar 10,26 persen namun secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp13,78 miliar dari penerimaan triwulan III tahun lalu.

Grafik Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan III 2018-2020

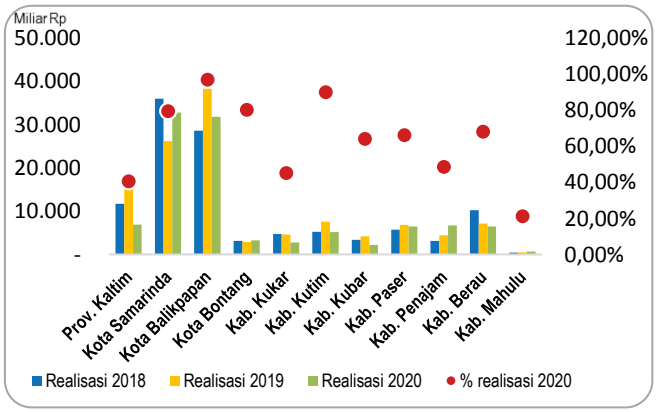

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

Berbeda dengan Pajak Daerah, nominal realisasi retribusi daerah terbesar tercatat di wilayah perkotaan yaitu di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda masing-masing sebesar Rp31,78 miliar dan Rp32,78 miliar. Hal ini sangat wajar karena sebagian besar aktifitas perekonomian yang dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah berlokasi di wilayah perkotaan.

c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada akhir Triwulan III 2020, realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah mencapai Rp154,69 miliar atau 50,27 persen, mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp335,23 miliar. Seluruh daerah mencatatkan penurunan nominal realisasi dibanding periode yang sama tahun lalu, kecuali Kota Samarinda. Nominal realisasi terbesar tercatat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp95,40 miliar atau 61,67 persen dari keseluruhan penerimaan.

Grafik Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

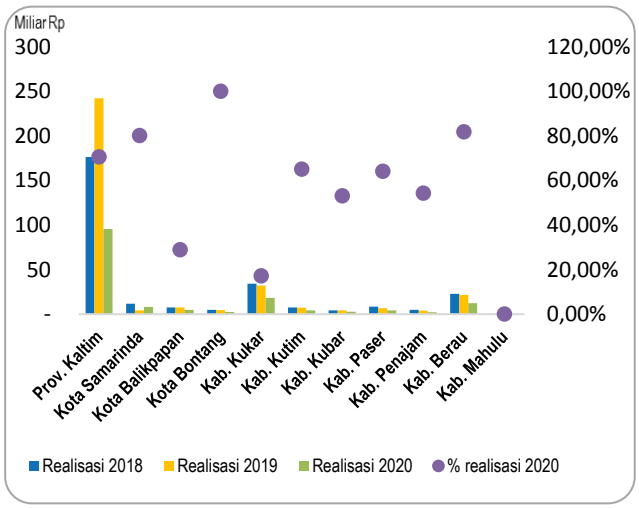

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

d) *Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah (LLPADYS)*

Secara agregat, penerimaan LLPADYS sampai akhir September 2020 baru mencapai 56,41 persen dari target atau sebesar Rp1,08 triliun. Penerimaan tertinggi secara nominal dibukukan oleh pemerintah Provinsi Kaltim dengan capaian sebesar Rp622,81 miliar sedangkan persentase peningkatan paling besar dibukukan oleh Kabupaten Paser sebesar 33,13 persen atau Rp21 miliar. Sementara itu, capaian penerimaanKabupaten Kutai Kartanegara pada Triwulan III ini masih sebesar 8,62% dan mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebeklumnya baik secara nominal maupun persentase masing-masing sebesar Rp136,76 miliar dan 84,80 persen.

Grafik Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Triwulan III 2018 – 2020

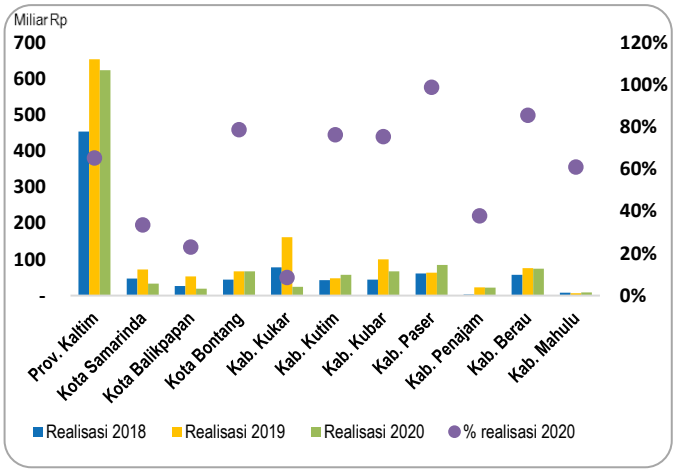

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer mencapai 71,55 persen dari pagu atau sebesar Rp18,22 triliun. Capaian ini menunjukkan sedikit kenaikan secara persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,24 persen, akan tetapi secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp448,82 miliar.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kontribusi realisasi Transfer Pemerintah Pusat terhadap total realisasi Pendapatan Daerah di regional ini menunjukkan adanya peningkatan di semua jenis kecuali Dana Alokasi Khusus. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh realisasi penerimaan baik pajak maupun sumber daya alam.

Grafik Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Total Pendapatan Daerah Triwulan III 2018 - 2020

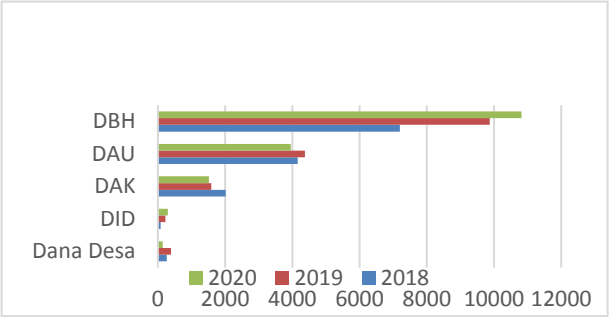

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS)

Pada Triwulan III 2020, nominal realisasi pendapatan ini mengalami penurunan secara agregat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp359,63 miliar menjadi Rp341,42 miliar. Secara nominal, kenaikan terbesar dicapai oleh Kabupaten Kutai Barat yang meningkat sebesar Rp95,61 miliar atau sebesar 131,27%, sementara itu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Mahakam Ulu mengalami penurunan yang signifikan masing-masing sebesar 100 persen, 100 persen, 80,74 persen dan 75,68 persen dibanding penerimaan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik Realisasi LLPDYS Triwulan III 2018 – 2020

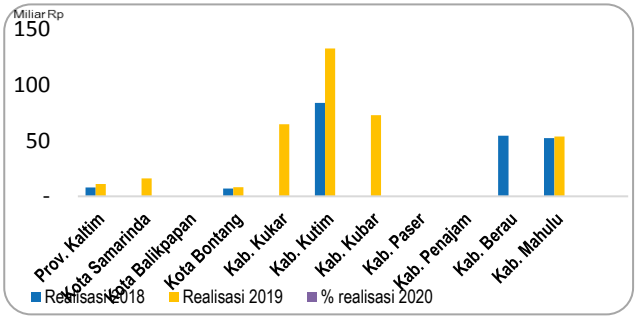

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

B. Belanja Daerah

Persentase realisasi total belanja (tanpa transfer) seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur tercatat turun pada Triwulan III 2020 menjadi 45,67 dari 45,95 persen dan 55,51 persen di triwulan III 2019 dan 2018. Tingkat penyerapan tertinggi pada periode ini bersumber dari Belanja Pegawai yang mencapai 62,50 persen dari pagu, disusul kemudian Belanja Bantuan Keuangan sebesar 53,02 persen dan Belanja Bunga sebesar 50,75 persen. Tingkat penyerapan

Belanja Modal mengalami penurunan yang cukup tinggi jika dibanding dengan tahun lalu dan masih tergolong belum optimal, hanya mencapai 29,93 persen dari pagu.

Pada periode pelaporan, kinerja realisasi belanja tertinggi tercatat pada Kabupaten Kutai Timur yang mencapai 68,94 persen. Sementara Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan tingkat penyerapan belanja yang terendah sebesar 32,87 persen. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2019 dan 2018 yang mampu mencapai 35,20 persen dan 41,23 persen.

Grafik Tingkat Realisasi Belanja Per Pemda Triwulan III 2018-2020

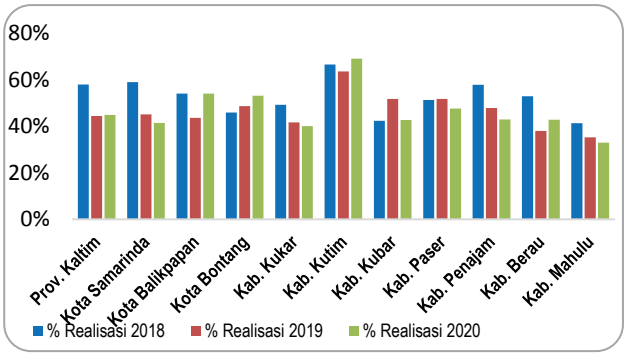

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

Grafik Persentase Realisasi Per Jenis Belanja Triwulan III 2018 – 2020

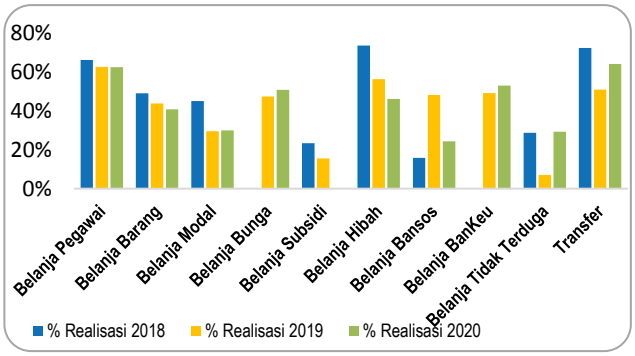

Sumber : BPKAD se-Kaltim (diolah)

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun

Prognosis realisasi APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan yang diperkirakan akan mempengaruhi realisasi anggaran. Pada sisi pendapatan, PAD diperkirakan mengikuti pola realisasi 5 tahun terakhir yang tercatat 85,6%, 98,3%, 88,47% , 100,27% dan 104,38%. Di sisi belanja, capaian realisasi 80,39% di tahun 2015, 85,41% di tahun 2016, 78,24% pada tahun 2017, 85,45% dan 85,31% menjadi salah satu pertimbangan utama penyusunan prognosis realisasi sampai akhir tahun 2020.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD s.d. Triwulan IV 2020

(Miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan Daerah	33.288,85	23.687,43	71,16%	31.757,56	95,40%
Belanja Daerah	34.424,73	15.720,87	45,67%	28.558,76	82,96%
Transfer	2.447,86	1.567,65	64,04%	2.404,78	98,24%
Surplus/Defisit	(3.583,74)	6.398,91	-178,55%	794,03	(22,16%)

Sumber : BPKAD se Kaltim

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel Konsolidasian Realisasi APBN-APBD Triwulan III 2018-2020

(Miliar Rp)

Uraian	2020				2019	2018
	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi	Konsolidasi
PENDAPATAN NEGARA	**11.678,84**	**23.687,43**	**15.782,33**	**-22,74%**	**20.426,80**	**18.696,13**
I. Penerimaan Perpajakan	10.517,99	3.788,89	14.306,88	-21,01%	18.112,76	16.310,56
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.160,85	1.080,02	1.402,08	-37,32%	2.236,94	2.349,52
III. Penerimaan Hibah		54,69	54,69	-29,08%	77,11	33,33
IV. Pendapatan Transfer		18.228,44	-	-100%	-	2,72
BELANJA NEGARA	**23.187,70**	**17.288,51**	**22.430,03**	**-0,82%**	**22.615,02**	**21.374,88**
I. Belanja Pemerintah	5.038,94	15.720,87	20.759,81	**-2,52%**	21.296,35	20.267,38
II. Transfer	18.148,76	1.567,65	1.670,22	**26,66%**	1.318,67	1.107,50
Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**(11.508,86)**	**6.398,91**	**(3.572,19)**	**63,25%**	**(2.188,22)**	**(2.678,75)**
Pembiayaan		**4.031,44**	**4.031,44**	**45,91%**	**2.762,92**	**744,22**
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah		4.080,50	4.080,50	45,46%	2.805,15	753,47
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		49,06	49,06	16,17%	42,23	9,25
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	**(11.508,86)**	**10.430,36**	**459,25**	**-20,09%**	**574,70**	**(1.934,52)**

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur

Periode Triwulan III 2020 menunjukkan realisasi Pendapatan Negara Konsolidasian turun cukup signifikan dari pendapatan sebesar Rp20,43 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp15,78 triliun pada triwulan III 2020. Pendapatan tersebut merupakan konsolidasi dari Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp 11,68 triliun dan Pendapatan Pemerintah Daerah konsolidasian sebesar Rp 4,10 triliun. Hal yang tidak berbeda terjadi pada realisasi belanja, realisasi Belanja Konsolidasian mengalami sedikit penurunan dari Rp22,61 triliun di Triwulan III 2019 menjadi sebesar Rp22,43 triliun pada Triwulan III 2020.

B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Perbandingan

   Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Kalimantan Timur pada akhir periode pelaporan tidak mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Perpajakan senantiasa menjadi kontributor terbesar dengan proporsi sebesar 90,65 persen di Triwulan III 2020, meningkat dari Triwulan III 2019 yang mencapai 88,67 persen dan Triwulan III 2018 yang mencapai 87,24 persen. Namun secara nominal menurun sebesar Rp3,81 triliun dari Triwulan III 2019.

Grafik Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Triwulan III 2018-2020

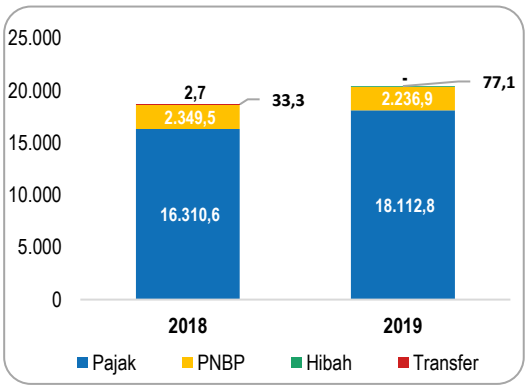

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltim

Grafik Komposisi Penerimaan Konsolidasian Triwulan III 2020

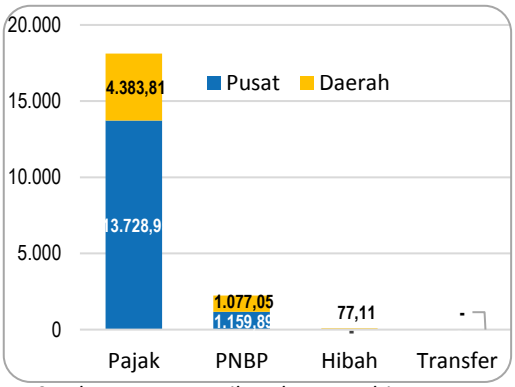

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltim

Pada periode laporan, 73,52 persen Penerimaan Perpajakan Konsolidasian atau sebesar Rp10,52 triliun adalah penerimaan Pemerintah Pusat sementara sebesar Rp3,79 triliun atau 26,48 persen merupakan kontribusi Pemerintah Daerah. Hal sama tercatat pada PNBP Konsolidasian, yang mencatatkan kontribusi Pemerintah Pusat lebih besar, 82,79 persen berasal dari pemersintah pusat. Sementara itu, pendapatan hibah dan transfer seluruhnya bersumber dari Pemerintah Daerah.

2. Analisis Perubahan

Tanpa pendapatan Hibah dan Transfer, Pendapatan Konsolidasian secara agregat mengalami penurunan sebesar 22,80 persen. Penerimaan Pajak mengalami penurunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masing-masing sebesar 23,34 persen dan 13,57 persen sedangkan penerimaan PNBP mengalami sedikit peningkatan baik oleh pemerintah pusat sebesar 0,08 persen maupun pemerintah daerah sebesar 0,28 persen. Penurunan ini mencerminkan adanya dampak dari kontraksi ekonomi yang terjadi di seluruh Indonesia.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Triwulan III 2018-2020

(Miliar)

Uraian	2018		2019		2020	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Perpajakan	16.310,56	18,21%	18.112,76	11,05%	14.306,88	(21,01%)
PNBP	2.349,52	(5,52%)	2.236,94	(4,79%)	1.402,08	(37,32%)
Total	**18.660,08**	**14,58%**	**20.349,70**	**9,05%**	**15.708,96**	**(22,80%)**
PDRB	160.612,02	1,78%	164.423,86	2,37%	144.242,93	(4,61%)

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltim

Perekonomian Kalimantan Timur pada Triwulan III 2020 tercatat turun sebesar 4,61 persen (*y-on-y*), lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan Triwulan III 2019 yang berhasil tumbuh sebesar 1,83 persen. Kontraksi ekonomi tersebut berdampak pada penurunan pendapatan di

Kaltim yang turun sebesar 22,80 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa terjadi kelesuan perekonomian yang berdampak pada kontraksi ekonomi dan penurunan pendapatan di Kalimantan Timur.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi Dan Perbandingan

Grafik Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Triwulan III 2018 - 2020

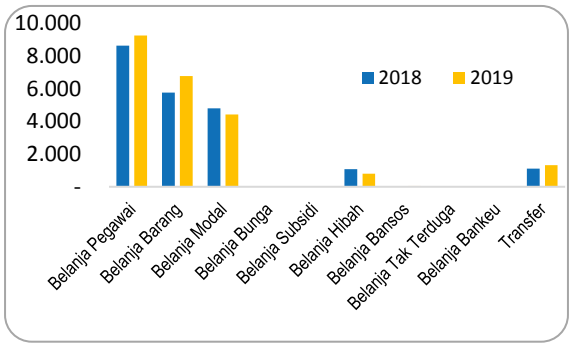

Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltim

Sebanyak 80,63 persen belanja pemerintah pada Triwulan III tahun 2020 digunakan untuk belanja operasional, sementara untuk belanja modal tercatat hanya 17,10 persen. Meskipun menunjukkan komposisi yang sama, pada periode 2020 ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu, saat dana pemerintah yang digunakan untuk belanja operasional lebih rendah, mencapai 74,67 persen dibandingkan belanja modal 19,50 persen.

2. Analisis Perubahan

Grafik Komposisi Belanja Konsolidasian Triwulan III Tahun 2020

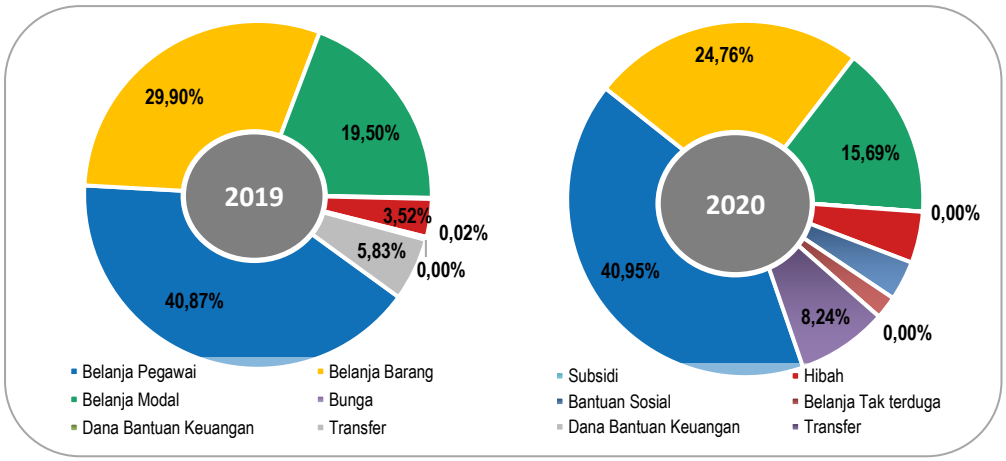

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltim

Realisasi belanja pada triwulan III tahun 2020 masih didominasi oleh Belanja Pegawai yang mencapai 40,95 persen. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan triwulan III tahun 2019 yang mencapai 40,87 persen. Sementara itu, penurunan terjadi pada kontribusi realisasi Belanja Barang dari semula 29,90 persen menjadi 24,76 persen serta kontribusi realisasi Belanja Modal dari 19,50 persen menjadi 15,69 persen.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal dalam bentuk APBN dan APBD yang dijalankan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai dengan Triwulan III 2020 relatif belum memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap pembentukan PDRB. Belanja pemerintah yang

turut memberikan kontribusi pada komponen Pembentukan Modal Bruto (PMTB) dan komponen Konsumsi Pemerintah dalam struktur PDRB sisi pengeluaran masih kecil, masing-masing sebesar 32,50 persen dan 4,56 persen.

Kebijakan fiskal dalam pengertian luas, yang termasuk kemudahan investasi, pemberian berbagai jenis insentif perpajakan, pengurangan/pembebasan bea masuk dan atau bea keluar, turut berperan terhadap pertumbuhan pada komponen Ekspor Luar Negeri yang terkontraksi sebesar 6,71 persen. Disisi lain, upaya serius pemerintah untuk mengubah pondasi perekonomian kalimantan Timur sehingga tidak bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian mampu mendongkrak sektor-sektor yang lain. Sektor industri pengolahan sebagai alternatif pembentuk PDRB tidak mampu untuk menghindarkan geliat industri pengolahan dari dampak pandemi COVID-19 sehingga turut terkontraksi 5,35 persen. Namun, kondisi berbeda terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi serta Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mampu menyumbang 0,11 persen dan 0,10 persen pertumbuhan di Kalimantan Timur serta sektor Pendidikan yang mampu untuk terus tumbuh.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel Kontribusi Pemerintah Dalam Pembentukan PDRB

(Triliun Rp)

Uraian	Triwulan III 2018	Triwulan III 2019	Triwulan III 2020
PDRB (ADHB)	160,61	164,42	144,24
Belanja Pemerintah	21,70	23,23	20,93
Kontribusi Belanja Pemerintah	**13,51%**	**14,13%**	**14,51%**
Investasi Pemerintah	4,78	4,41	3,52
Kontribusi Investasi Pemerintah	**2,98%**	**2,68%**	**2,44%**

Sumber: BPS Provinsi Kaltim dan LO GFS Kanwil DJPb Prov. Kaltim

Kontribusi belanja pemerintah dalam pembentukan PDRB pada triwulan III tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,24 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pada Triwulan III 2020 menurun senilai Rp2,3 triliun dari Rp23,23 triliun di periode sama tahun 2019.

Kondisi yang sama terjadi untuk kontribusi investasi pemerintah. *Kontribusi investasi pemerintah semakin menurun dari tahun 2018, pada triwulan III tahun 2018 berkontribusi sebesar 2,98 persen, turun menjadi 2,68 persen di tahun 2019 dan pada Triwulan III tahun 2020 kontribusi investasi pemerintah hanya menyisakan 2,44 persen.*

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DI MASA PANDEMI

Sampai dengan triwulan III ini tampaknya penyebaran Covid-19 masih terjadi begitu cepat dan luas mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa terutama pada sektor ekonomi, yang mana dalam perekonomian kita mengenal sisi permintaan (*demand side*) dan sisi penawaran (*supply side*). Pandemi ini mempengaruhi kedua sisi tersebut sehingga bukan hanya konsumen yang tertekan tetapi dari produsen juga terdampak dengan adanya penurunan permintaan. Hal ini merupakan konsekuensi kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial dengan menerapkan protokol kesehatan yang membatasi dan menghindari masyarakat yang berkumpul sehingga diharapkan dapat menekan penyerbaran Covid-19 ini yang pada akhirnya berdampak terhadap volatilitas harga komoditi, pasar keuangan, serta perdagangan antar negara dan daerah sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang mana dalam dua triwulan berturut-turut Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sehingga membuat Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Akan tetapi Pemerintah baik itu Pusat dan Daerah tidak akan pernah menyerah untuk membangkitkan perekonomian dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan khusus untuk menanggulangi dampak Covid-19 ini.

A.1 APBN

Dalam situasi pandemi seperti saat ini Pemerintah tetap mengutamakan kesehatan di atas segalanya, sehingga dalam setiap kegiatan atau program Pemerintah selalu mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Walaupun demikian pemulihan ekonomi akibat pandemi ini juga menjadi prioritas dari Pemerintah, berbagai kebijakan telah dikeluarkan, perubahan postur APBN pun dilakukan untuk penguatan perekonomian nasional maupun regional dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Pemulihan ekonomi khususnya di Kalimantan Timur dilakukan dengan percepatan belanja dan pelaksanaan program padat karya, serta *refocusing* belanja, dan pengalokasian anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi saat ini stimulus yang bisa dilakukan hanyalah dengan bantuan tunai atau berbentuk bantuan pangan. Hal ini harus dilakukan karena memang sektor swasta tidak bisa diharapkan untuk membentuk sistem perekonomian yang memadai. Dengan sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka Program PEN seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai menjadi penyokong masyarakat miskin maupun masyarakat yang rentan miskin untuk menjaga konsumsi masyarakat tetap terjaga di tengah berlakunya pembatasan sosial serta untuk meminimalkan terjadinya dampak sosial akibat Covid-19.

Tabel 5.1

Program PEN di Provinsi Kalimantan Timur s.d Triwulan III 2020

Program Keluarga Harapan		Bantuan Pangan Non Tunai		Bantuan Sosial Tunai		Kartu Prakerja	
Volume (KPM)	Realisasi (miliar Rp)	Volume (KPM)	Realisasi (miliar Rp)	Volume (KPM)	Realisasi (miliar Rp)	Volume (Peserta)	Realisasi (miliar Rp)
518,942	197,82	1,117,054	212,39	406,028	121,8	110,124	390,94

Sumber: OMSPAN (data diolah)

Pelaksanaan program PEN pada tahun 2020 di Kalimantan Timur, memiliki anggaran sebesar Rp922,95 miliar. Alokasi ini digunakan untuk penanggulangan dampak covid-19 yang terbagi kedalam beberapa program yaitu PKH sebesar Rp197,82 miliar yang disalurkan kepada 518,942 Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) sebesar Rp212,39 miliar yang menyasar 1,117,054 KPM; Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 121,8 miliar bagi 406,028 KPM; dan Kartu Prakerja sebesar Rp390,94 miliar untuk 110,124 peserta, dimana pada saat pandemi seperti saat ini lapangan pekerjaan sangat terbatas. Penyaluran Program PEN ini diharapkan dapat terlaksana tepat sasaran dan tepat waktu sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menimbulkan multiplier effect untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami kontraksi.

Tabel 5.2

Program Padat Karya Tunai di Provinsi Kalimantan Timur s.d Triwulan III 2020

Kementerian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tenaga Kerja
Kementerian Pertanian	12,350,413,000	8,957,605,771	72.53%	22,834
Kementerian Perhubungan	46,408,592,000	8,120,000,376	17.50%	285
Kementerian KKP	365,750,000	-	0.00%	
Kementerian PUPR	191,604,966,000	164,583,566,000	85.90%	10,512

Sumber: OMSPAN (data diolah)

Selain program PEN, Pemerintah juga menambahkan alokasi untuk program Padat Karya Tunai (PKT). PKT ini diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja terutama yang terimbas pandemi seperti pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja yang dirumahkan sementara. PKT ini juga menyasar tenaga kerja atau masyarakat di wilayah sekitar proyek infrastruktur dengan tujuan untuk meningkatkan rasa memiliki akan infrastruktur yang dibangun atau dikerjakan. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri ada empat Kementerian yang mendapatkan alokasi PKT ini seperti tampak pada tabel 5.2 dengan total Rp250,7 miliar dan sampai dengan triwulan III ini sudah terserap Rp181,66 miliar atau sekitar 72% dan menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja.

Berbagai program Pemerintah ini diharapkan mampu menjadi social safety net bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sehingga konsumsi masyarakat golongan menengah ke bawah tetap terjaga. Penanganan pandemi ini tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk saling mengisi dan melengkapi program-program yang ada.

A.2 APBD

Tidak hanya Pemerintah Pusat yang gencar untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini, akan tetapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga tidak kalah untuk memberikan kontribusi bagi penyelamatan ekonomi terutama di Kalimantan Timur. Untuk tahap pertama di awal pandemi telah direalokasi APBD di Kalimantan Timur sebesar Rp36,66 miliar untuk penanganan pandemi ini. Alokasi ini digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana kesehatan guna mempersiapkan menampung pasien-pasien positif Covid-19, serta digunakan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan reagen tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Untuk tahap pertama ini telah terserap sekitar 92 persen.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengalokasikan dana untuk penanggulangan Covid-19 ini yang diambil dari Belanja Tidak Langsung (BTT) sebesar Rp500

miliar. Anggaran Rp 500 miliar tersebut rencananya akan digunakan untuk perbaikan fasilitas di Laboratorium Kesehatan Kaltim, bantuan dampak sosial ke masyarakat, insentif tenaga kesehatan, bantuan stimulan usaha, dan lain-lain. Sampai dengan akhir September 2020 ini alokasi kedua tersebut telah terserap sebesar 30,86 persen.

Dari keberadaan dana APBD tersebut, diharapkan dapat meminimalisasi dampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur.

B. PENYALURAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi)

Pandemi Covid-19 ini telah memukul perekonomian dari berbagai sisi. Salah satu sektor yang terdampak adalah para pelaku UMKM. Pembatasan sosial baik itu skala besar maupun kecil telah mempersempit sektor UMKM untuk berkembang bahkan sekedar untuk bertahan. Konsumsi masyarakat yang menurun drastis membuat sektor UMKM berjuan mati-matian untuk bertahan hidup. Dalam peribahasa Jepang disebutkan *"Ichinan satte mata ichinan"* yang dapat diartikan masalah yang datang secara bertubi-tubi, disaat kesehatan menjadi fokus utama Pemerintah akan tetapi masalah UMKM ini juga tidak bisa dibiarkan begitu saja karena sebagian besar masyarakat berkecimpung di sektor ini.

Apabila kita *flashback* ke tahun 1998 dimana terjadi krisis moneter yang menghantam Indonesia, dimana perusahaan-perusahaan besar bertumbangan, sektor UMKM menjadi penyelamat dan menjadi tumpuan perekonomian. Hal ini dikarenakan memang dari segi fundamental krisis 1998 berbeda dengan saat ini, utang luar negeri yang melilit perusahaan besar tidak terjadi di sektor UMKM. Tetapi saat pandemi sekarang ini membuat segalanya berbeda karena turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat menghantam sektor UMKM cukup telak.

Pangsa pasar yang dimiliki UMKM di Kalimantan Timur pada umumnya adalah kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik sandang maupun pangan serta penjualan oleh-oleh khas Kalimantan. Pembatasan sosial yang dilakukan Pemerintah membuat pergerakan UMKM di Kalimantan Timur menjadi terbatas sehingga banyak diantara UMKM tersebut yang mengurangi produksi ataupun menghentikan kegiatannya karena hasil yang didapatkan tidak sepadan dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Di Kalimantan Timur sendiri, total data UMKM terdampak Covid-19 sebanyak 307.343 UMKM. (sumber: Data Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindagkop dan UKM Kaltim).

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan beberapa cara dalam menangani dampak Covid-19 terhadap UMKM. Yaitu melalui pembinaan dan peningkatan SDM pelaku usaha, contohnya melalui Bimbingan Teknis IKM Pangan dan Sandang, beberapa pelatihan seperti Pelatihan Pengolahan Produk Makanan, Pelatihan Kemasan Produk dan Pelatihan Kerajinan Kayu. Pemerintah juga mendukung Gerakan #BanggaBuatanIndonesia melalui Gerakan Ekonomi Beli Produk UKM Kaltim (SK Gubernur No. 518/3618/EK) tanggal 16 Juni 2020. Dengan berbagai kegiatan dan adanya tindak lanjut dari Gubernur yang nyata diharapkan UMKM di Kalimantan Timur ini dapat bertahan dan bahkan bisa mengulangi sukses krisis 1998 yang menjadi penopang perekonomian.

Profil UMKM yang tumbuh di Kalimantan Timur umumnya terdiri atas kluster produsen, kluster usaha dagang, dan kluster jasa. Produsen umumnya memproduksi aneka makanan dan minuman, usaha dagang mencakup pedagang kaki lima, catering, aneka warung kuliner, toko pakaian, toko sembako. Sedangkan usaha jasa seperti, bengkel, salon, dan fotokopi. Dari semua kegiatan UMKM tersebut membutuhkan mobilitas manusia atau masyarakat sebagai konsumennya, sehingga pada saat pandemi ini yang mana semua kegiatan masyarakat dibatasi

membuat UMKM menderita

Tabel 5.3
Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kalimantan Timur per Lembaga Penyalur s.d. Triwulan III 2020

Lembaga Penyalur	Jumlah Debitur	Jumlah Penyaluran (Rp)
PEGADAIAN	4253	21.925.945.700
KSPS BMT UGT SIDOGIRI	588	2.568.293.909
KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	4	16.000.000
KSPPS NUR INSANI	1	2.000.000
PNM	24	70.000.000
Jumlah	**4.870**	**24.582.239.609**

Sumber: SIKP UMi (data diolah)

Untuk itu dibutuhkan kebijakan Pemerintah dalam rangka melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha di sektor riil. Hal ini sangat diperlukan para pelaku UMKM yang dalam masa pandemi ini kesulitan dalam menjaga *cash flow* nya atau dengan kata lain kesulitan likuiditasnya. Salah satu stimulus tersebut adalah penundaan angsuran pokok (relaksasi) bagi penerima program kredit Ultra Mikro (UMi). Relaksasi diberikan kepada debitur, *linkage* dan penyalur UMi maksimal selama enam bulan, dengan mekanisme pemberian yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama (Perdirut) Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-05/IP/2020 tentang Tata Cara Pemberian Relaksasi Bagi Penerima Pembiayaan Ultra Mikro Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan adanya kebijakan yang memberikan masa tenggang pembayaran kewajiban pokok UMi ini diharapkan dapat meringankan beban UMKM akibat pandemi Covid-19 yang memang tidak terduga dan merupakan kejadian luar biasa.

Dapat kita lihat di tabel 5.3 di atas, sampai dengan triwulan III 2020, penyaluran UMi di Kalimantan Timur sudah cukupmengembirakan dengan debitur mencapai 4870 dan dana yang tersalurkan sebesar Rp24,5 miliar. Untuk agen penyalur UMi ini memang berbeda dengan KUR, apabila KUR itu disalurkan oleh perbankan maka UMi ini disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), sehingga dari segi jangkauan wilayah atau kantor cabang yang ada LKBB pasti kalah oleh Perbankan. Di Kalimantan Timur sendiri ada lima lembaga penyalur UMi ini yaitu, PT. Pegadaian, KSPS BMT UGT Sidogiri, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama, KSPPS Nur Insani, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sampai dengan triwulan III 2020 ini PT Pegadaian masih mendominasi penyaluran UMi ini dengan meraup 4253 debitur dan total penyaluran Rp21,92 miliar, sementara itu lembaga penyalur yang paling sedikit penyaluran pembiayaan UMi nya terdapat pada KSPPS Nur Insani yang hanya mendapat satu debitur dengan jumlah penyaluran Rp2 juta.

Grafik 5.1
Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kalimantan Timur per daerah s.d. Triwulan III 2020 (jiwa, juta Rp)

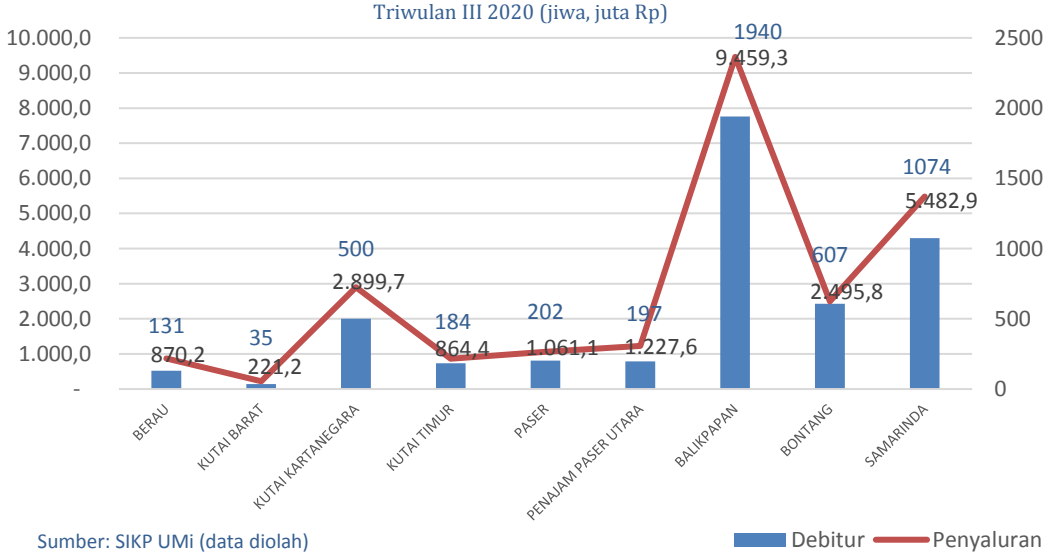

Sumber: SIKP UMi (data diolah)

Apabila dilihat dari penyaluran per wilayah maka sampai dengan triwulan III 2020 ini dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 9 kapubaten/kota yang terdapat penyaluran pembiayaan UMi. Balikpapan sebagai kota tersebsar di Kalimantan Timur memperoleh debitur terbanyak mencapai 1940 debitur dengan total penyaluran Rp9,45 miliar. Sedangkan untuk wilayah terendah terdapat di Kabupaten Kutai Barat dengan 35 debitur dan Rp221,2 juta penyaluran.

Dengan adanya stimulus dan kebijakan di sektor riil ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian secara umum dan khususnya di Kalimantan Timur.

DJPb
Indonesian Treasury

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4 Samarinda, Telepon 0541-201348
www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim